

**KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT TERHADAP
PENGUNGSASAL AFGHANISTAN PASCAPERALIHAN
KEKUASAAN KEPADA TALIBAN**

(Skripsi)

Oleh

Sekar Ayu Kinanti

NPM. 1716071066



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

ABSTRAK

KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT TERHADAP PENGUNGSIS ASAL AFGHANISTAN PASCAPERALIHAN KEKUASAAN KEPADA TALIBAN

OLEH

SEKAR AYU KINANTI

Konflik bersenjata Amerika Serikat (AS)-Afghanistan selama 20 tahun yang berujung pada peralihan kekuasaan kepada Taliban telah mengakibatkan pergerakan pengungsi asal Afghanistan secara masif ke seluruh dunia. Krisis kemanusiaan ini ditanggapi dengan cepat oleh banyak negara terutama negara yang telah meratifikasi *The Refugee Convention 1951* termasuk AS. Namun AS telah melampaui kewajibannya dalam konvensi tersebut dengan membentuk program *resettlement* bagi pengungsi asal Afghanistan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan kepentingan nasional AS melalui program *resettlement* bagi pengungsi asal Afghanistan, serta menggunakan konsep kepentingan nasional dalam analisis. Penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka dan studi dokumentasi yang dilakukan terhadap sumber data seperti jurnal artikel dan buku, dokumen resmi dan materi audiovisual milik Pemerintah AS.

Hasil penelitian ini adalah AS setidaknya memiliki tiga jenis kepentingan terhadap pengungsi Afghanistan. Seperti kepentingan keamanan, terkait dengan kondisi pengungsi sebelumnya merupakan aliansi lokal bagi tentara AS serta spesifikasinya sebagai penerjemah di medan perang, dan meredam narasi perang Islam dan Barat untuk mencegah tindak terorisme lanjutan. Kepentingan ekonomi yang berhubungan dengan potensi penerimaan pajak dan pendapatan per kapita. Hingga kepentingan moralitas internasional yang berhubungan dengan tanggung jawab AS terhadap pengungsi Afghanistan serta kesempatan memperbaiki citra dengan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan.

Kata kunci: Amerika Serikat, kepentingan nasional, program *resettlement*, pengungsi Afghanistan, Taliban.

ABSTRACT

US' NATIONAL INTEREST IN AFGHAN REFUGEES AFTER TALIBAN TAKEOVER

By

SEKAR AYU KINANTI

The 20-year US-Afghanistan armed conflict that led to the Taliban takeover has resulted in a massive movement of Afghan refugees around the world. This humanitarian crisis has been responded rapidly by many countries, especially those that have ratified The Refugee Convention 1951, including the US. However, the US has exceeded its obligations under the Convention by establishing a resettlement programme for Afghan refugees. This research uses a descriptive analysis method conducted with a qualitative approach to describe US national interests through the resettlement program for Afghan refugees, and using national interest concept for analyzing. This research uses literature review techniques and documentation studies conducted on data sources such as journal articles and books, official documents and audio-visual materials from the US government. The result of this research is that the US has at least three (3) types of interests towards Afghan refugees. Such as security interests, related to the condition that refugees were previously local allies for the US army and their specifications as translators on the battlefield, reduce the narrative of war between Islam and the West to prevent further acts of terrorism. Economic interests related to potential tax revenues and per capita income. International moral interests related to the US responsibility towards Afghan refugees and the opportunity to improve its image by promoting humanitarian values.

Keywords: the United States, national interest, resettlement program, Afghan refugees, Taliban.

**KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT TERHADAP
PENGUNGSASAL AFGHANISTAN PASCAPERALIHAN
KEKUASAAN KEPADA TALIBAN**

Oleh

Sekar Ayu Kinanti

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **KEPENTINGAN NASIONAL AMERIKA SERIKAT TERHADAP PENGUNSI ASAL AFGHANISTAN PASCAPERALIHAN KEKUASAAN KEPADA TALIBAN**

Nama Mahasiswa : **Sekar Ayu Kinanti**

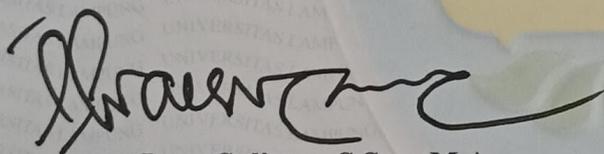
Nomor Pokok Mahasiswa : **1716071066**

Jurusan : **Hubungan Internasional**

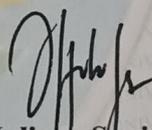
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

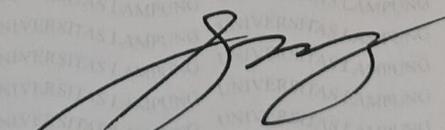


Iwan Sulistyono, S.Sos., M.A.
NIP. 198604282015041004



Fitri Julianna Sanjaya, S.I.P., M.A.
NIP. 198807172023212043

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

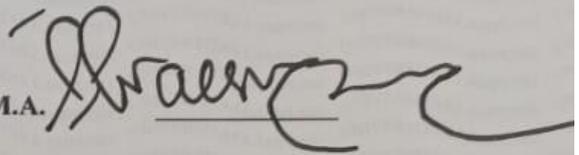


Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A.
NIP. 19810628 200501 1 003

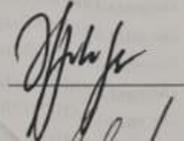
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

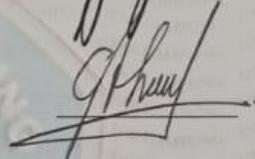
Ketua : Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.



Sekretaris : Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A



Penguji Utama : Gita Karisma, S.I.P., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 8 Desember 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 8 Desember 2023
Yang membuat pernyataan



Sekar Ayu Kimanti
NPM. 1716071066

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Sekar Ayu Kinanti. Lahir di Batam, Kepulauan Riau pada 15 Juli 1999 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak M Sabir Kallang (alm) dan Ibu Novi Widyastuti, S.Sos.. Penulis menyelesaikan pendidikan awal di TK Islam Darussalam Sekupang pada 2005, kemudian menyelesaikan pendidikan di SDN 003 Unggulan Sinjai Utara pada 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 01 Kalirejo Lampung Tengah, serta menyelesaikan pendidikan di SMA Tri Sukses Natar Lampung Selatan. Penulis diterima sebagai mahasiswa program S1 Hubungan Internasional Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN pada tahun 2017. Dalam proses perkuliahan, penulis memiliki ketertarikan dengan studi pada bidang keamanan global khususnya pada isu-isu keamanan non tradisional.

Penulis memutuskan untuk tidak bergabung dalam kepengurusan HMJ HI, namun berkesempatan untuk berkontribusi dalam beberapa acara yang dilaksanakan seperti Sakai Sambaiyan Fest dan PSNMHII 2017. Penulis telah melaksanakan program Praktik Kerja Lapangan di Badan Pelaksana *Sustainable Development Goals* (BP-SDGs) Universitas Lampung, dalam kesempatan ini penulis dilibatkan dalam *pilot project* yang didanai Uni Eropa dan *Climate Resilience and Inclusive Cities* (CRIC), serta berkesempatan terlibat sebagai *research assistant* pada proyek pembuatan buku panduan yang diprakarsai oleh Raoul Wallenberg Institute Sweden, serta proyek penelitian hibah yang didanai oleh Aflatoun International Belanda. Penulis juga tercatat sebagai staff di NGO yaitu *Edelweiss Center for Sustainable Development* (ECSD) sejak tahun 2020-2023.

Motto

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan”

(Al-Insyirah, 94:5)

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

“Dia bersamamu di mana saja kamu berada”

(Al-Hadid, 47:5)

PERSEMBAHAN

Untuk Ibu, dan Adik-adik yang kusayangi

PRAKATA

Allhamdulillahirobbilalamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, karena rahmat, kasih dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *Kepentingan Nasional AS terhadap Pengungsi Afghanistan Pascaperalihan Kekuasaan ke Taliban*. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa syukur, hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas segala kemudahan, kelancaran, hidayah, dan kekuatan yang tidak terhitung, yang telah Engkau berikan dalam hidup dan penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.
3. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung.
4. Mas Iwan Sulisty, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu serta tenaganya dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Mba Gita Karisma, S.I.P., M.Si., selaku Dosen Penguji skripsi penulis dalam setiap bimbingan, saran, maupun kritik yang membangun bagi kelancaran skripsi penulis.
6. Mba Fitri Juliana Sanjaya, S.I.P., M.A, selaku Dosen Pembimbing Pendamping untuk segala kesabaran, dukungan moral yang begitu bermakna, tenaga dan waktu dalam kelancaran penulisan skripsi penulis.
7. Seluruh jajaran Dosen FISIP Universitas Lampung, khususnya jurusan Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
8. Seluruh staf dan karyawan FISIP Universitas Lampung.

9. Rekan-rekan HI Unila, khususnya angkatan 2017.
10. Ibunda penulis, Novi Widyastuti, S.Sos., untuk segala dukungan, motivasi terkuat, pengertian, dan doanya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan selesai. *Alhamdulillah jazaa kilahu khoiro.*
11. Adik-adik penulis, Sekar Arum Kinasih, (S.Pd.) dan Mario Viantiko Shenna, semoga bisa selalu sukses dalam studinya dan membanggakan keluarga.
12. Nyiayu Vannisa Cahyani, S.Sos., kakak tingkat yang amat baik, rekan kerja yang pengertian, juga teman curhat *overthinking* penulis selama pengerjaan skripsi.
13. Sahabat penulis, Thea Mutiara, yang sudah menemani penulis dalam selama perkuliahan, yang selalu menolong penulis ketika mengalami kesulitan selama perkuliahan, terutama di banyak momen berat di semester awal, yang bersedia menemani dan mendengarkan keluhan penulis setiap hari, terima kasih banyak.
14. Untuk diriku sendiri. Otsukare!

Bandar Lampung, 8 Desember 2023

Sekar Ayu Kinanti
NPM. 1716071066

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Landasan Konseptual	18
2.3 Kerangka Pemikiran	22
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian.....	24
3.2 Fokus Penelitian	25
3.3 Jenis dan Sumber Data	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data	27
3.5 Level Analisis dan Unit Analisis	27
3.6 Teknik Analisis Data	27
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Situasi Afghanistan Sebelum dan Sesudah Peralihan Kekuasaan kepada Taliban	29
4.2 Analisis Kepentingan Nasional AS dalam Pemberlakuan Program <i>Resettlement</i> Terhadap Pengungsi asal Afghanistan.....	40
4.2.1 Keamanan	51

4.2.2 Ekonomi	55
4.2.3 Moralitas Internasional	62
V. SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	69
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.1.Level analisis, unit analisis, dan unit eksplanasi.....	27
Tabel 4.1 Jumlah pengungsi yang telah dimukimkan di AS.....	45
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Pengungsi asal Afghanistan (2019).....	57
Tabel 4.3 Statistik Pajak Pengungsi asal Afghanistan (2019)	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Hasil pemetaan VosViewer	11
Gambar 2 Kerangka Pikir.....	23
Gambar 3 Peta Sebaran Pengungsi yang dimukimkan kembali di AS	47
Gambar 4 Sebaran Pos Agensi Penerimaan dan Penempatan Tahun Fiskal 2023	49
Gambar 5 Jumlah Tenaga Kerja.....	59
Gambar 6 Tingkat Pengangguran di AS	60

DAFTAR SINGKATAN

AAA	: <i>Afghan Adjustment Act</i>
AFN	: Afghanistan Afgani (mata uang Afghanistan)
AS	: Amerika Serikat
DHS	: <i>the Department of Homeland Security</i>
FBI	: <i>Federal Bureau of Investigation</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICJ	: <i>International Court Justice</i>
ISAF	: <i>International Security Assistance Force</i>
ISIS-K	: <i>Islamic State of Iraq and Syria – Khorasan Province</i>
ILO	: <i>International Labour Organization</i>
INA	: <i>Immigration and Nationality Act</i>
IOM	: <i>International Organizaton for Migration</i>
IRC	: <i>International Rescue Committee</i>
ISAF	: <i>International Security Assistance Force</i>
LGBTQI+	: <i>Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and Intersex</i>
NRC	: <i>Norwegian Refugee Committee</i>
OAW	: <i>Operation Allies Welcome</i>
OECD	: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
ORR	: <i>Office of Refugee Resettlement</i>
SIV	: <i>Special Immigrant Visa</i>

UN : *United Nations*
UNAMA : *United Nations Assistance Mission in Afghanistan*
UNHCR : *United Nations High Commissioner for Refugees*
USAID : *United States Agency International Development*
USCIS : *United States Citizenship and Immigration Services*
USRAP : *United States Refugee Admissions Program*
WR : *World Relief*

I. PENDAHULUAN

Bab ini mendeskripsikan fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini melalui rangkaian peristiwa yang terjadi, yaitu rangkaian kejadian sebelum terjadinya perebutan kekuasaan oleh Taliban atas Afghanistan. Selain itu, bab ini membahas penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini, rumusan masalah penelitian, serta tujuan penelitian hingga kegunaan penelitian yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis.

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembentukan *The Refugee Convention 1951* dilakukan sebagai respons dalam menanggapi fenomena pengungsi sebagai korban yang merasakan langsung dampak dari perang dan konflik, pengungsi dinilai sebagai fenomena yang harus ditangani dengan kerja sama penuh dari seluruh pihak di level internasional. *The Refugee Convention* dibentuk oleh *United Nations Conference on the Status of Refugees and Stateless Persons* pada 2-25 Juli 1951 di Jenewa, sebagai respons dari dampak pengungsi yang muncul setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II (UNHCR, 1990). Sebanyak 149 negara telah meratifikasi konvensi tersebut dan menyetujui pelaksanaan perlindungan pengungsi yang diwajibkan (UNHCR, 2021b).

The Refugee Convention memuat definisi dan prinsip perlindungan bagi pengungsi. Konvensi Pengungsi menggambarkan pengungsi sebagai “seseorang yang tidak mampu atau tidak mau kembali ke negara asalnya karena ketakutan yang beralasan akan penganiayaan karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik.” (UNHCR, 2021b). Konvensi tersebut juga menetapkan prinsip *non-discrimination*, *non-penalization*,

dan *non-refoulement* (tanpa diskriminasi, tanpa hukuman, tanpa pemulangan secara paksa) bagi negara yang meratifikasi konvensi ini (UNHCR, 2021b).

Perundang-undangan Amerika Serikat menyebutkan pengungsi berdasarkan *Immigration and Nationality Act* (INA) adalah orang dari negara asing yang mengalami persekusi ataupun merasakan rasa takut akan persekusi dikarenakan isu-isu yang berkaitan dengan agama, kewarganegaraan, ras, keanggotaan dalam sebuah komunitas sosial, ataupun dikarenakan memiliki pendapat atau pandangan politik. Semenjak disahkannya *Refugee Act* pada tahun 1980, Amerika Serikat tercatat sudah menampung kurang lebih 3,1 juta pengungsi (state.gov, 2021).

Kongres Amerika Serikat mengesahkan *Immigration and Nationality Act* pada (INA) pada tahun 1952 sebagai bentuk ratifikasi Amerika Serikat atas *United Nations Convention Pertaining to the Refugee Convention* 1951. Undang-undang mengatur bahwa pemberian suaka dapat dikeluarkan ketika pihak yang meminta dapat menjelaskan bentuk ketakutan, ancaman atau penindasan yang dikarenakan oleh agama, ras, etnis, afiliasi politik, pendapat politik, atau kelompok sosial tertentu. Pihak pemohon pemberian suaka harus mendatangkan argumentasi yang dapat mendukung alasan-alasan tersebut, baik dalam bentuk testimoni penindasan yang memang mereka alami, atau catatan-catatan historis maupun pemberitaan yang memang mendukung bahwa mereka merupakan target potensial dari hal-hal tersebut di negara asal mereka, atau faktor dan kondisi yang sedang terjadi di negara asal mereka yang dapat mendorong hal-hal yang mereka takutkan akan terjadi kepada mereka (US Congress, 1952). Berdasarkan *United Nations Protocol relating to the Status of Refugees* yang disahkan pada tahun 1967 dan disepakati oleh Amerika Serikat pada tahun 1968, Amerika Serikat secara umum dilarang untuk memaksa pengungsi kembali ke negara yang mengancam kehidupan maupun kemerdekaan mereka (Baugh, 2020).

Bersamaan dengan keinginan Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan *Immigration and Nationality Act* 1952, ada kekhawatiran yang muncul berkaitan dengan apakah Amerika Serikat memiliki mekanisme yang jelas dan efisien untuk memproses pengajuan-pengajuan pencari suaka untuk mengungsi serta bagaimana hak dan kewajiban baik si pencari suaka maupun

negara dapat berjalan beriringan dan sesuai dengan *United Nations Convention Pertaining to the Refugee Convention* 1951 maupun *Immigration and Nationality Act* 1952. Karena INA 1952 dipandang belum mampu memberikan perlindungan yang jelas dan kepastian kedepannya bagi pengungsi disebabkan ketidakpastian mekanisme pemrosesan pengajuan pencari suaka untuk mengungsi, bahkan INA 1952 memungkinkan Jaksa Agung untuk menentukan siapa yang harus diberikan hanya berdasarkan pertimbangannya sendiri (Kshatriya, 2019).

Dampaknya, hasil dari proses pengajuan pencari suaka dan legalitas pengungsi di Amerika Serikat akan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan situasi yang berkembang di Amerika Serikat. Salah satu contohnya adalah pemerintah AS yang mengecualikan beberapa kelompok imigran yang berasal dari negara-negara tertentu, khususnya negara-negara yang dipandang sebagai negara komunis (USCIS, 2018).

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) pada pertengahan tahun 2021 telah menerbitkan data pengungsi yang berada dalam mandat UNHCR sejumlah 26,6 juta orang, diantaranya adalah pengungsi asal Afghanistan sejumlah 2,6 juta individu yang berada di berbagai penjuru dunia. UNHCR memperkirakan angka ini terus meningkat seiring dengan meningkatnya korban akibat konflik bersenjata di penjuru dunia, ditambah dengan peristiwa yang terjadi pada perang Afghanistan dan AS pada Agustus 2021 silam (UNHCR, 2021c).

Per 2023, pengungsi paling banyak berasal dari Afghanistan, yang hanya dikalahkan oleh jumlah pengungsi dari Suriah. Pengungsi terbanyak berasal dari suriah dengan jumlah 6.5 juta orang; posisi kedua ditempati Afghanistan dengan jumlah 6.1 juta pengungsi; posisi terakhir ditempati oleh Ukraina dengan jumlah 5.9 juta pengungsi (UNHCR, 2023). Pengungsi dari Afghanistan sebagian besarnya mengungsi ke negara-negara tetangga khususnya Pakistan, sementara yang lain juga banyak yang mengungsi ke Iran, India, bahkan ke negara-negara Eropa barat maupun Amerika Utara (UNHCR). Kekerasan dan perang tercatat menjadi faktor paling besar yang mendorong begitu banyak warga Afghanistan yang memilih untuk pergi meninggalkan negaranya, sekalipun juga ada faktor lain seperti bencana alam, namun faktor tersebut tidak memberikan angka pengungsi

yang signifikan jika dibandingkan dengan faktor kekerasan dan perang (Schmeidl, 2014). Menurut laporan yang disampaikan oleh *International Organization for Migration* (IOM), ada lebih dari 5 juta orang pengungsi dari Afghanistan pada tahun 2021 (International Organization for Migration, 2022).

Gelombang pertama pengungsi dari Afghanistan berawal di tahun 1979 yaitu dari invasi Uni Soviet ke Afghanistan yang didahului oleh peristiwa Revolusi Saur pada tahun 1978 (Amstutz, 1994). Ketika Uni Soviet menarik pasukan mereka dari Afghanistan dan menyudahi invasi mereka pada tahun 1989, banyak dari pengungsi yang tersebar ke negara-negara tetangga mulai kembali ke Afghanistan (UNHCR, 1999). Namun, berdasarkan beberapa laporan mengenai penyebaran pengungsi, jumlah pengungsi dari Afghanistan pada tahun 1992 masih mencapai 20 % populasi Afghanistan sendiri (refworld.org, 1999). Hal ini pun tidak membaik dikarenakan pecahnya Perang Saudara Afghanistan yang terjadi selama 4 tahun lamanya (1992-1996) (Schmeidl & Bose, 2016).

Selanjutnya, gelombang pengungsi dari Afghanistan kembali memuncak ketika Amerika Serikat menjalankan serangan ke Afghanistan dengan alasan perang melawan terorisme global¹. Namun Obama kembali mengumumkan bahwa rencana penarikan pasukan militer AS ditunda pelaksanaannya hingga tahun 2016, penundaan ini dilakukan setelah pertemuannya dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang meminta penundaan tersebut, Ghani menilai bahwa saat itu Afghanistan belum sepenuhnya menjadi negara yang aman bagi warganya sendiri dan belum memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan Taliban di perang berikutnya. Sehingga ia meminta Obama untuk memperlambat laju penarikan

¹ Konflik bersenjata antara Afghanistan dan Amerika Serikat (AS) bermula pada 11 September 2001, terjadi pembajakan pesawat komersil sejumlah empat (4) unit yang terdiri dari 1 unit American Airlines Flight 11 dan 1 unit United Airlines Flight 175 yang menabrak gedung World Trade Center di New York, lalu American Airlines Flight 77 yang menabrak Markas Besar Departemen Pertahanan AS, The Pentagon di Arlington, serta pesawat milik United Airlines Flight 93 yang menabrak sebuah lapangan di Shanksville, Pennsylvania. Serangan ini merupakan serangan tunggal yang dilakukan oleh pembajak sejumlah empat belas (14) orang laki-laki yang berasal dari jaringan Al-Qaeda yang diketahui beroperasi dibawah gerakan kepemimpinan Osama bin Laden dan berbasis di Afghanistan. Serangan ini bertujuan sebagai gerakan terorisme dalam bentuk serangan bunuh diri oleh ke 14 pelaku sekaligus serangan terhadap ikon AS dengan cara ditabrak menggunakan empat pesawat komersil tersebut. Kejadian ini diperkirakan menewaskan kurang lebih 3000 warga AS beserta warga internasional lainnya (National Commission on Terrorist Attacks Upon The United States, 2004). Peristiwa ini membuat AS menyatakan perang melawan terorisme yang populer dengan kampanye *Global War on Terror* atau *War on Terror*, kampanye ini menyerukan perlawanan AS terhadap keberadaan terorisme di seluruh dunia setelah penyerangan yang dilancarkan oleh Al-Qaeda yaitu Serangan 9/11 2001 (Bush, 2011).

pasukan militer AS dari Afghanistan. Obama menunda rencana tersebut dan mengirimkan 5000 tentara tambahan untuk menetap di Afghanistan hingga penarikannya selesai berdasarkan permintaan Presiden Ashraf Ghani (Washington Post, 2015).

Pada masa pemerintahan Donald Trump, diperkirakan ada kurang lebih 11,000 tentara AS yang bertugas di Afghanistan (Thomas et al., 2021). Dilansir dari kanal YouTube resmi *Trump White House Archived*, rencana penarikan pasukan militer di Afghanistan menurut Trump dianggap sebagai sebuah rencana yang terburu-buru, melihat dari pengalaman sebelumnya yakni jatuhnya Iraq pascapenarikan pasukan militer AS dari Iraq². Trump menganggap penarikan pasukan yang cepat hanya akan membuang kesempatan dan kemenangan yang sudah susah payah dibangun dan kesia-siaan dari pengorbanan yang begitu besar, sehingga Trump tidak menyetujui penarikan pasukan militer AS dari Afghanistan (*President Trump Gives a Presidential Address to the Nation - YouTube*, 2017).

Rencana penarikan pasukan tersebut diumumkan akan dilaksanakan di hari-hari terakhir pemerintahan Trump di tahun 2020 sebelum pelantikan Joe Biden sebagai Presiden terpilih berikutnya. Dalam sebuah wawancara yang diunggah di akun Twitter resmi Arsip Gedung Putih, Trump menyatakan bahwa ia akan menarik seluruh angkatan bersenjata yang bertugas di Afghanistan dan penarikan tersebut harus selesai pada akhir 2020 (*The White House 45 Archived*, 2020).

Sebelumnya pada Februari 2020, AS dan Taliban telah menyepakati bahwa AS sudah memastikan akan menarik seluruh perwakilan militer dan penduduk kembali ke AS. Taliban berjanji dalam proses penarikan tersebut akan mencegah kelompok apapun untuk mengganggu AS dan aliansinya. Selama tahun

² Pada tahun 2011 Presiden Obama membentuk kebijakan penarikan pasukan militer dari Afghanistan. Melalui kanal YouTube resmi Obama White House Archived, Obama menyatakan bahwa kebijakan ini dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa tentara Afghanistan dianggap telah memiliki kesiapan yang cukup matang untuk menjaga wilayahnya dari ancaman Taliban dan Al-Qaeda, serta menyatakan bahwa rencana penarikan pasukan militer AS akan dimulai di tahun 2012 dan diselesaikan di tahun 2014 (The Obama White House, 2011). Pada tanggal 28 Desember 2014, pasukan khusus AS mengonfirmasi bahwa mereka telah berhasil membunuh Osama bin Laden, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan *Operation Freedom's Sentinel* yaitu operasi pelatihan dan pendampingan bagi angkatan bersenjata Afghanistan oleh angkatan bersenjata AS pada 1 Januari 2015 (Torreon, 2020).

2020, pelaksanaan rencana penarikan pasukan AS telah dimulai dan hal tersebut dilakukan secara bertahap. Pada pertengahan tahun, penempatan pasukan AS mulai bertahap turun ke angka 8,600 orang dari 11,000 orang pasukan yang dikirimkan oleh AS (*Remarks by President Biden on the Way Forward in Afghanistan*, 2021).

Selanjutnya, pada tahun 2021 AS telah melakukan penarikan pasukan dan tetap merencanakan untuk menyisakan 2,500 orang tentara untuk ditempatkan di Afghanistan (Thomas et al., 2021). Saat Joe Biden terpilih sebagai presiden AS, Biden menyatakan bahwa tujuan dari keberadaan pasukan militer AS di Afghanistan semakin tidak jelas pasca keberhasilan mereka membunuh Osama bin Laden, lalu Biden mengumumkan bahwa AS akan melaksanakan penarikan gelombang terakhir pasukan militer yang dipastikan selesai pada tanggal 11 September 2021 tepat di perayaan 20 tahun pascaserangan 9/11 sekaligus menyatakan bahwa perang terpanjang dalam sejarah AS telah berakhir (The White House, 2021a).

Namun pada tanggal 8 Juli, Biden mengumumkan bahwa misi mereka akan dipercepat dan diselesaikan pada tanggal 31 Agustus 2021. Pengumuman ini memicu pergerakan Taliban yang mengambil-alih Kabul pada bulan Agustus yang membuat AS mengerahkan lebih banyak personel tambahan untuk mengevakuasi para perwakilan diplomatik dan beberapa warga Afghanistan keluar dari Kabul (The White House, 2021b). Direbutnya kota Kabul oleh Taliban dan menandai pengambil alihan kekuasaan Afghanistan oleh Taliban juga menandai awal dari gelombang pengungsi baru yang berusaha melarikan diri dari Afghanistan karena rasa takut akan kekerasan yang akan mungkin kembali terulang, sebagaimana yang pernah terjadi pasca berakhirnya Perang Saudara Afghanistan.

Kondisi akibat invasi meningkatkan keinginan penduduk untuk melarikan diri hingga nekat menaiki pesawat yang mengangkut tentara untuk kembali ke AS. Reuters merilis data pengungsi Afghanistan yang mengungsi ke AS diperkirakan berjumlah 4,000 jiwa yang diangkut melalui jalur udara termasuk pasukan militer, warga negara AS serta perwakilan diplomatik AS (Reuters, 2021c).

Biden menepati janji kampanyenya dengan merencanakan program *resettlement* (pemukiman kembali) bagi para pengungsi asal Afghanistan untuk

menetap di AS dengan kuota pengungsi sebanyak 125,000 orang yang tercantum pada rancangan anggaran pemerintah AS pada tahun fiskal 2022 (International Rescue Committee (IRC), 2021). Tindakan Pemerintah AS yang membuka negaranya untuk menerima pengungsi dari Afghanistan ini sejalan dengan kewajiban bagi negara-negara yang meratifikasi *Refugee Convention 1951*. Dengan membuat program *resettlement* bagi pengungsi yang berasal dari Afghanistan, pemerintah Amerika Serikat sudah memberikan program bagi pengungsi yang lebih dibandingkan dari apa yang didorong oleh *Refugee Convention 1951*, karena konvensi ini tidak mewajibkan mekanisme *resettlement*, negara penerima yang memiliki hak untuk menentukan apakah pengungsi tersebut diterima untuk dimukimkan di negaranya, bukan UNHCR maupun konvensi lainnya. Selain itu, *resettlement* tidak dianggap sebagai hak bagi pengungsi melainkan hak negara penerima dalam penetapannya (The UN Refugee Agency, 2011).

Penulis menilai ada beberapa penyebab mengapa Amerika Serikat menjadi negara yang menarik untuk dibahas berkenaan dengan pengungsi Afghanistan. Yang pertama, karena gelombang pengungsi dari Afghanistan kembali meningkat jumlahnya ketika Amerika Serikat melakukan serangan ke Afghanistan di akhir tahun 2001 (Bureau of Population, Refugees and Migration (PRM), 2023b). Yang kedua, jatuhnya Kabul ke tangan Taliban dan menandai peralihan kekuasaan ke pihak Taliban juga dipengaruhi oleh penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan (BBC News, 2021). Yang ketiga, dengan adanya tren spektrum politik ultra-kanan di Amerika Serikat, setelah naiknya Trump ke kursi Presiden dan masih bertahannya tren tersebut hingga Biden menjabat sebagai presiden, maka kebijakan *resettlement* bagi pengungsi Afghanistan di Amerika Serikat akan menjadi penelitian yang menarik. Hal tersebut juga memengaruhi besarnya sentimen anti-imigran di Amerika Serikat hingga saat ini (Nadeem, 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Pembentukan kebijakan luar negeri sudah seharusnya mencerminkan kepentingan nasional dan menjadi alat untuk mencapai kepentingan tersebut. Sebab kepentingan nasional merupakan nilai inti yang wajib dicapai sebuah

negara, dilindungi serta dipromosikan keberadaannya bagi para pemimpin negara (Jackson & Sørensen, 2013). Rencana AS dalam program *resettlement* ini merupakan salah satu kebijakan luar negeri yang sudah seharusnya memuat kepentingan nasional yang hendak dicapai oleh AS, karena kepentingan nasional merupakan pertimbangan utama sebelum sebuah kebijakan luar negeri dibentuk. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjawab sebuah pertanyaan, yaitu: **“Mengapa Amerika Serikat memberlakukan program *resettlement* terhadap pengungsi asal Afghanistan pascaperalihan kekuasaan kepada Taliban dan penarikan pasukan militer?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan kondisi pengungsi asal Afghanistan sebelum dan sesudah peralihan kekuasaan kepada Taliban tahun 2021; dan
2. Menganalisis kepentingan nasional Amerika Serikat dalam pemberlakuan program *resettlement* terhadap pengungsi asal Afghanistan pasca peralihan kekuasaan kepada Taliban.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan, yakni akademis dan praktis.

Secara akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada kajian kepentingan nasional dalam isu pengungsi dan pencari suaka, terkhusus pada kawasan Amerika.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dalam hasil maupun seluruh proses sebagai referensi tambahan yang dapat membantu penelitian berikutnya.

Secara praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran situasi di Afghanistan sebelum dan sesudah penarikan pasukan militer AS.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kebijakan AS terhadap pengungsi asal Afghanistan pascaperalihan kekuasaan dan penarikan pasukan militernya.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terkait analisis kepentingan nasional dibalik kebijakan AS sebagai respons dari datangnya pengungsi Afghanistan pascapenarikan pasukan militernya yang kemudian dapat dimanfaatkan sebagai referensi alternatif untuk penelitian berikutnya dalam lingkup pembahasan yang sama.
4. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya terkait isu kepentingan nasional dibalik kebijakan terhadap pengungsi di kawasan Amerika maupun secara khusus kebijakan yang ditetapkan AS.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka terdiri dalam dua bagian. Bagian pertama menjabarkan landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penggunaan konsep kepentingan nasional yang diterangkan dalam perspektif *English School*. Kerangka pemikiran yang membantu penulis menjelaskan cara penelitian dilakukan juga menjelaskan bagaimana hasil penelitian diperoleh, juga menggambarkan secara singkat kepentingan nasional AS terhadap pengungsi dalam program pemukiman kembali pascaperalihan Afghanistan kepada Taliban diuraikan pada bagian kedua dalam bab ini.

2.1 Penelitian Terdahulu

Topik kepentingan nasional termasuk topik yang banyak diteliti oleh akademisi Hubungan Internasional. Dengan tujuan mendukung penelitian ini, penulis telah menghimpun empat sumber penelitian terdahulu sebagai acuan bagi penelitian ini. Penelitian-penelitian ini penulis gunakan sebagai acuan penelitian baik dari sumber informasi termasuk referensi yang digunakan, serta variabel yang dipergunakan dalam penelitian tersebut. Langkah ini juga dijalankan untuk menemukan *novelty* (kebaharuan) dan perbedaan pada penelitian yang dilakukan.

Kebaruan dalam penelitian ini dapat ditunjukkan melalui metode bibliometrik. Metode bibliometrik adalah metode statistik yang akan menghimpun dan menganalisis buku, artikel jurnal, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan suatu konten ilmiah (Ball, 2021). Metode ini dilakukan dengan menggunakan dua perangkat lunak, yaitu Publish or Perish untuk menghimpun basis data referensi, yang kemudian hasilnya dipetakan menggunakan VosViewer.

Penelitian **pertama** ialah penelitian yang berjudul *How Robust Refugee Protection Policies Can Strengthen Human and National Security* (Kerwin, 2016). Dalam penelitian ini, Kerwin menerangkan bahwa seringkali kebijakan proteksi pengungsi dipandang sebagai sebuah hal yang menentang serta mengancam keamanan nasional sebab adanya ancaman keamanan yang ditimbulkan dengan hadirnya kelompok pengungsi di sebuah negara, seperti ancaman kriminal dalam skala domestik dan ancaman menyusupnya teroris yang memungkinkan adanya ancaman dalam skala yang lebih besar. Pandangan ini seringkali menempatkan kebijakan bagi pengungsi sebagai proses sekuritisasi bagi pengungsi di negara penerima. Sehingga kepentingan dan keamanan nasional tidak jarang menjadi faktor tidak didukungnya atau tidak optimalnya sebuah kebijakan perlindungan bagi pengungsi yang telah dibuat. Namun Kerwin berargumen bahwa sebenarnya keberadaan pengungsi dapat berkontribusi pada performa ekonomi, kekuatan militer, posisi diplomatik, serta nilai sipil sebuah negara. Kerwin juga menambahkan rekomendasi strategi yang berisi langkah-langkah yang dapat dilakukan Kongres AS untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan keamanan perlindungan bagi pengungsi AS (Kerwin, 2016).

Penelitian Kerwin ini menggunakan konsep keamanan nasional untuk membentuk strategi yang memaksimalkan manfaat kebijakan pengungsi bagi kepentingan nasional AS. Sedangkan penulis menggunakan konsep dan strategi yang dibentuk oleh Kerwin untuk menganalisis apakah AS menerapkan strategi tersebut dalam mencapai kepentingan nasionalnya dalam konflik bersenjata dengan Afghanistan. Perbedaan lainnya, Kerwin tidak secara spesifik menjelaskan hubungan antara asal pengungsi dengan kepentingan langsung AS terhadap negara yang dimaksud. Penelitian yang dilakukan oleh penulis secara spesifik membahas kontribusi pengungsi asal Afghanistan dan hubungannya dengan kepentingan AS terhadap Afghanistan dalam konflik bersenjata tersebut.

Penelitian **kedua** berjudul *Refugee Policy as Foreign Policy: Iraqi and Afghan Refugee Resettlements to the United States* (Micinski, 2018). Penelitian ini membandingkan pemukiman kembali oleh AS yang dilakukan terhadap dua negara yaitu Irak dan Afghanistan, dimana AS memukimkan penduduk Irak sejumlah 4 kali penduduk Afghanistan. Selain itu, AS juga mengklasifikasikan

Irak sebagai negara dalam grup prioritas penempatan kembali, dan tidak mengelompokkan Afghanistan di kelompok yang sama, walaupun invasi yang AS lakukan di kedua negara tersebut memiliki tujuan yang sama.

Penelitian ini menggunakan teori Politik Tetangga (*The politics of neighbours*) untuk menganalisis kebijakan luar negeri terhadap pengungsi yang menggunakan tiga faktor penentu pembentukan kebijakan yaitu: 1) asal perpindahan; 2) dinamika intra-daerah asal; dan 3) kepentingan strategis negara penerima di negara tetangga dari negara asal. Hasil penelitiannya adalah AS memiliki kepentingan atas Irak yaitu AS memiliki keterlibatan di area pengungsian terbaru seperti Yordania, Suriah, dan Irak, serta adanya kepentingan strategis AS di Yordania dan Irak sebagai sekutu dekat (Micinski, 2018). Walaupun ditemukan data bahwa dari aspek keamanan nasional, penduduk Irak terbukti lebih berpotensi dalam meningkatkan ancaman keamanan yang lebih nyata, yaitu dengan kejadian FBI menangkap dua orang Irak karena diduga berniat mengirimkan senjata ke Irak. Sedangkan perlakuannya terhadap Afghanistan, AS tidak memukimkan kembali penduduk Afghanistan sebanyak penduduk Irak sebab kepentingan AS adalah mempertahankan para penduduk Afghanistan disana untuk melemahkan rezim Soviet dan keberadaan Taliban (Micinski, 2018). Penelitian ini berfokus pada perbandingan kebijakan AS terhadap dua negara yang dipengaruhi masing-masing kepentingan di negara-negara tersebut.

Micinski menggunakan teori Politik Tetangga dalam penelitian untuk menganalisis perbedaan kebijakan *resettlement* bagi warga Irak dan Afghanistan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan, akan meneliti satu elemen yang mirip dalam teori Politik Tetangga yang menjadi salah satu faktor pembentukan kebijakan *resettlement* bagi pengungsi asal Afghanistan, yaitu faktor kepentingan strategis negara penerima terhadap negara asal.

Penelitian **ketiga** berjudul *The US Refugee Resettlement Program — A Return to First Principles: How Refugees Help to Define, Strengthen, and Revitalize the United States* (Kerwin, 2018). Dalam penelitian ini, Kerwin melanjutkan argumennya mengenai keberadaan pengungsi yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap negara penerima. Dalam tulisan ini,

Kerwin meneliti kontribusi dari aspek fiskal, ekonomi dan tenaga kerja yang dihasilkan dari keberadaan pengungsi yang tiba di AS pada rentang tahun 1987-2016.

Pertama, ditemukan bahwa tenaga kerja dari kelompok pengungsi memiliki persentase pekerja terampil lebih tinggi (38%) daripada kelompok non pengungsi (33%) dan kelompok warga negara asing (35%). Kedua, rata-rata pendapatan kelompok pengungsi ada di angka US\$43 ribu, angka ini hampir menyamai kelompok non pengungsi (US\$45 ribu), kelompok warga negara asing (US\$56 ribu), dan rata-rata seluruh warga AS (US\$52,8 ribu) (Kerwin, 2018).

Kelompok pengungsi yang dimaksud adalah mereka yang memasuki AS, memiliki keterampilan rendah, datang tanpa memiliki pemasukan dan aset, serta kemampuan bahasa Inggris yang rendah. Namun dengan peningkatan penghasilan yang drastis yang hampir menyamai kelompok warga lainnya, Kerwin menilai bahwa sesungguhnya penghasilan kelompok pengungsi ini melampaui kelompok masyarakat lainnya berdasarkan performa yang dilakukan oleh kelompok pengungsi. Ketiga, dari keseluruhan kelompok pengungsi, 10% diantaranya bekerja sebagai wiraswasta, dan termasuk dalam total 9% pencipta lapangan pekerjaan di seluruh AS (Kerwin, 2018). Penelitian ini berfokus pada kontribusi pengungsi di aspek fiskal dan ekonomi dan tidak mengelaborasi lebih jauh mengenai kontribusi pada aspek politik serta aspek keamanan nasional (Kerwin, 2018).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Kerwin menggunakan konsep kepentingan nasional untuk menjelaskan secara rinci meneliti aspek fiskal, ekonomi, dan tenaga kerja yang diperoleh melalui pengungsi dalam jangka waktu 1987-2016. Yang mana data ini akan menjadi acuan tambahan dalam penelitian yang akan penulis lakukan dalam meneliti gambaran prediksi kontribusi pada aspek ekonomi pengungsi asal Afghanistan melalui penerimaan pajak dan tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu.

Penelitian **keempat** berjudul *Promoting Compliance with Human Rights: The Performance of the United Nations' Universal Periodic Review and Treaty Bodies* (Carrano, 2019). Carrano menjelaskan adanya tiga teori yang meneliti

kepatuhan negara dalam perjanjian internasional khususnya perjanjian hak asasi manusia (HAM). Teori pertama adalah teori penegakan. Penegakan didefinisikan sebagai sebuah strategi yang diadopsi negara atau multilateral yang bertujuan untuk menetapkan pola pikir para pemimpin negara bahwa akan ada konsekuensi negatif yang akan mengikuti ketidakpatuhan yang mereka buat. Langkah yang sering dilakukan ialah tekanan politik, penarikan insentif positif, hingga sanksi ekonomi. Sehingga kepatuhan ini dapat dilihat sebagai perhitungan *cost-benefit* yang akan membuat negara mempertimbangkan ketidakpatuhan yang akan mereka buat (Carrano, 2019). Kepatuhan ini juga menjadi sebuah insentif untuk performa yang baik serta seperangkat alat yang dapat menindak ketidakpatuhan. Dalam kepatuhan perlu ada kepastian keuntungan yang akan diperoleh akan tinggi, serta kehadiran ancaman hukuman yang cukup berat. Sehingga aktor diasumsikan akan bertindak secara strategis, memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian.

Penulis menggunakan data yang diperoleh untuk melakukan analisis seperti Carrano untuk menjelaskan keuntungan tinggi atau hukuman berat yang akan diperoleh AS jika menerapkan atau tidak menerapkan kebijakan *resettlement* bagi pengungsi asal Afghanistan dalam bentuk kepentingan nasional yang hendak dicapai AS di dalam penelitian ini.

Penelitian **kelima** oleh Lutz dan Portmann yang berjudul *Why do states admit refugees? A comparative analysis of resettlement policies in OECD countries* pada tahun 2021 (Lutz & Portmann, 2021). Lutz dan Portmann menyatakan bahwa kebijakan pemukiman kembali bukan hanya kebijakan yang dibuat semata karena alasan kemanusiaan, melainkan juga sebagai alat dan pembuktian janji politik pemerintah. Namun walaupun dengan keuntungan yang diperoleh negara penerima, negara penerima semakin membuat peraturan yang memperketat dan mempersempit gerak pengungsi dan pencari suaka di negara tersebut dimana hal tersebut akan mempermudah kontrol dan pengawasan dari negara penerima (Lutz & Portmann, 2021).

Penulis menggunakan referensi ini sebagai acuan dan data penguat bahwa ada kepentingan nasional dan tujuan tertentu yang ingin dicapai negara ketika membentuk dan melaksanakan sebuah kebijakan walaupun kebijakan tersebut

dapat digolongkan sebagai kebijakan dalam aspek kemanusiaan seperti kebijakan penerimaan dan penempatan kembali bagi pengungsi dan pencari suaka

Penelitian **keenam** oleh W. Pearlman yang berjudul *Culture or Bureaucracy? Challenges in Syrian Refugees' Initial Settlement in Germany* pada tahun 2017. Jerman adalah negara yang memiliki birokrasi yang dianggap cukup rumit tidak hanya bagi pendatang baru, namun juga bagi warga lokal Jerman sendiri. Birokrasi yang rumit dianggap sebagai proses integrasi yang baik dimana hal ini menjadi proses adaptasi bagi warga pendatang baru, yang terdiri dari pengungsi dan pencari suaka (Pearlman, 2017). Jerman telah mengusahakan anggaran yang begitu besar untuk kesejahteraan pengungsi, melatih guru-guru bahasa Jerman, mengusahakan untuk mengubah kisah krisis pengungsi menjadi sebuah kesuksesan Jerman. Akan tetapi justru ditemukan beberapa kecemasan yang meningkat akibat birokrasi yang rumit ini. Penantian status hukum yang panjang, perpindahan yang rumit dan lama, perjuangan dalam mendapatkan pekerjaan yang kemudian menjadi isu utama bagi para pengungsi dan pencari suaka di Jerman (Pearlman, 2017). Namun karena adanya kesamaan dengan masyarakat Jerman yang juga merasa kesulitan dalam proses birokrasi Jerman, Wolfgang berpendapat bahwa birokrasi dan pelayanan publik dapat menjadi proses integrasi utama yang menyatukan seluruh Jerman (Pearlman, 2017).

Berikut ini merupakan tabel yang merangkum perbedaan dari himpunan penelitian terdahulu di atas:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

	Literature 1	Literature 2	Literature 3	Literature 4	Literature 5	Literature 6
Judul	<i>How Robust Refugee Protection Policies Can Strengthen Human and National Security</i>	<i>Refugee Policy as Foreign Policy: Iraqi and Afghan Refugee Resettlements to the United States</i>	<i>The US Refugee Resettlement Program — A Return to First Principles: How Refugees Help to Define, Strengthen, and Revitalize the United States</i>	<i>Promoting Compliance with Human Rights: The Performance of the United Nations' Universal Periodic Review and Treaty Bodies</i>	<i>Why do states admit refugees? A comparative analysis of resettlement policies in OECD countries</i>	<i>Culture or Bureaucracy? Challenges in Syrian Refugees' Initial Settlement in Germany</i>
Penulis	D. Kerwin	Nicolas R. Micinski	D. Kerwin	V. Carrano	P. Lutz dan L. Portman	W. Pearlman
Teori/ Konsep	Keamanan Nasional	<i>The policy of neighbours</i>	Kontribusi ekonomi dan pekerja	Kepatuhan	Perbandingan Kebijakan	Birokrasi
Argumen utama	Kebijakan perlindungan pengungsi dapat dioptimalkan untuk mendukung keamanan nasional negara penerima	Perbedaan pelaksanaan kebijakan <i>resettlement</i> bagi warga Irak dan Afghanistan walau kedua negara diinvasi dengan alasan yang sama	Kebijakan penempatan kembali pengungsi dapat melayani kepentingan nasional dan nilai AS	Negara sangat mungkin untuk melanggar perjanjian HAM sebab tidak ada dampak signifikan secara internasional	Kebijakan pemukiman kembali digunakan negara sebagai janji politik, tidak hanya untuk perlindungan kemanusiaan	Jerman dianggap sebagai negara yang ramah karena menerima lebih dari 400 ribu warga Suriah
Fokus Penelitian	Penelitian ini berfokus kontribusi pengungsi pada keamanan nasional AS	Penelitian ini berfokus pada penyebab perbedaan pelaksanaan kebijakan <i>resettlement</i> bagi warga Irak dan Afghanistan.	Penelitian ini berfokus pada kontribusi pengungsi pada fiskal dan ekonomi AS	Penelitian ini berfokus pada tingkat kepatuhan negara pada perjanjian HAM internasional melalui mekanisme PBB	Penelitian ini berfokus pada alasan negara menerima pengungsi	Penelitian ini berfokus pada bidang-bidang birokrasi untuk mengatasi kecemasan adaptasi pendatang baru
Hasil	Ada 6 rekomendasi kebijakan untuk memperkuat dan mengamankan sistem perlindungan pengungsi.	Adanya kepentingan yang berbeda terhadap kedua negara tersebut, terutama mengenai hubungan dengan negara di sekitar Irak	Pengungsi berkontribusi pada pemasukan pajak, peningkatan pendapatan per kapita, dan lapangan pekerjaan.	Mekanisme UPR mampu menghasilkan tekanan politis dan tekanan publik yang sesuai penjelasan Teori Penegakan	Pemukiman kembali memiliki kebijakan yang terbuka bagi pengungsi juga membatasi pergerakan pengungsi itu sendiri	Jerman memiliki beberapa bidang yang difokuskan untuk mempermudah proses adaptasi pengungsi yang ditempatkan kembali, yang juga dipersiapkan sebagai tenaga kerja di Jerman

Sumber: Diolah oleh penulis

2.2 Landasan Konseptual

Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional seringkali menjadi faktor utama dari sebuah negara dalam proses pengambilan keputusan. Walau secara utuh, konsep kepentingan nasional tidak memiliki ukuran secara universal dalam mengukur kepentingan nasional itu sendiri. Namun para ilmuwan telah mencoba merumuskan konsep ini serta variabel yang mempengaruhinya.

Sebagai salah satu konsep tertua, tiap perspektif memiliki definisinya masing-masing mengenai konsep kepentingan nasional. Perspektif tertua seperti Realisme Klasik dan Liberalisme Utopia memiliki pandangan yang berbeda mengenai konsep ini. Perspektif Realisme Klasik mendefinisikan kepentingan nasional sebagai konsep pencapaian tujuan negara berdasarkan keamanan nasional dan keberlangsungan negara. Sebagai aktor tunggal, negara menjadi hal yang paling esensial bagi kehidupan warga negara yang aman dan tentram. Ketiadaan negara akan meniadakan keamanan negara sehingga Hobbes dalam Jackson dan Sorensen mendefinisikan kehidupan warga negaranya sebagai kehidupan “sepi, miskin, kotor, kasar dan pendek” (Jackson & Sørensen, 2013). Pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan teritori, penduduk, serta moral dan nilai hidup yang khas adalah negara. Kepentingan nasional menjadi penentu akhir dalam penilaian kebijakan luar negeri. Hal ini menyebabkan negara-negara tidak dapat saling bergantung dan saling percaya karena negara diasumsikan untuk terus melakukan segala cara untuk mencapai kepentingannya (Jackson & Sørensen, 2013).

Namun perspektif Realisme terhadap konsep kepentingan nasional tidak mampu menjelaskan fenomena pencapaian kepentingan nasional melalui penerimaan pengungsi ini. Perspektif ini tidak bisa menjelaskan apakah ada keuntungan yang akan didapat negara, sebab pemikir Realisme Klasik beranggapan bahwa kedatangan pengungsi hanya akan menjadi beban ekonomi negara, serta tidak diakuinya aktor lain selain negara sehingga dengan prinsip ini tidak akan sesuai dengan hipotesis bahwa kedatangan pengungsi akan dapat membantu pencapaian kepentingan nasional negara.

Perspektif *English School* merupakan perspektif yang mampu menyediakan kerangka pikir untuk menjelaskan fenomena ini. Secara garis besar, perspektif ini menekankan pentingnya identifikasi dan memperkuat dasar tatanan internasional untuk menekan ketidakpastian dan meningkatkan prediktabilitas yang tinggi dalam sistem internasional. Perspektif ini percaya bahwa negara-negara bisa untuk bekerja sama namun perlu ada komitmen bersama serta aturan dan lembaga yang dapat menengahi konflik (Burchill, 2005). Pada akhirnya, pengejaran kepentingan nasional menurut perspektif ini tidak cukup hanya dengan apa yang telah dikemukakan para pemikir Realisme Klasik yaitu keamanan negara semata, namun perlu melibatkan kepedulian negara-negara atas satu kepentingan bersama yang diakui dan disepakati bersama yaitu ketertiban dunia untuk hidup berdampingan melalui komitmen, kerjasama, juga lembaga dan aturan yang dapat meredam konflik internasional yang juga dapat dicapai melalui pembentukan hukum internasional, dialog antar pemerintah, organisasi internasional, maupun konvensi-konvensi internasional yang juga merupakan dari kerangka kerja, aturan, dan institusi yang membentuk budaya diplomatik (Burchill, 2005).

Kerjasama lintas negara yang mulai terbentuk secara perlahan melibatkan masyarakat yang secara sukarela bekerjasama satu sama lain. Keberadaan kerjasama masyarakat internasional ini perlahan menjadi salah satu faktor penting dalam mempertahankan tatanan internasional, dan memiliki kekuatan yang kemudian diterima secara luas walau tidak memiliki posisi politik yang begitu kuat namun kuat dalam keterlibatan kerjasama ekonomi, sosial, serta lembaga-lembaga internasional yang mulai terbentuk. Kelompok masyarakat ini mulai disebut sebagai masyarakat internasional, serta hal-hal yang terbentuk karena keberadaan masyarakat ini disimpulkan sebagai kesadaran sosial yang disebutkan oleh pemikir *English School* (Burchill, 2005). Sebagian besar pemikir *English School* condong terhadap pemikiran Realisme Klasik mengenai keamanan strategis dan pencapaian ekonomi, namun juga menambahkan “kewajiban terhadap kemanusiaan” menjadi kategori lain dalam pencapaian kepentingan nasional yang menjadi prinsip-prinsip moral yang dapat diterapkan (Burchill, 2005). Walaupun kepatuhan internasional terhadap prinsip moral yang disebutkan belum sepenuhnya terlaksana mengingat masing-masing negara tetap memiliki

wewenangannya sendiri dalam pengejaran kepentingan nasionalnya, namun tetap ada negara-negara dengan pemikiran dan pendapat yang serupa mengenai kepedulian terhadap kemanusiaan yang bersifat universal dan dimiliki setiap individu di dunia. Perspektif Realisme Klasik tidak dapat menjelaskan manfaat dan pandangan moral atas kepedulian terhadap kemanusiaan karena perspektif ini secara penuh berfokus terhadap keberlangsungan dan keberadaan negara sebagai aktor tunggal (Burchill, 2005).

Berdasarkan perspektif English School, perspektif ini meyakini bahwa pengejaran kepentingan nasional suatu negara harus dilengkapi dengan kepedulian etis dan moral seperti mempromosikan perdamaian global dan menghormati kewajiban terhadap kemanusiaan melalui peran institusi. Diyakini bahwa hal yang diperlukan negara ialah kemajuan dalam bentuk keadilan sosial global yang lebih tinggi serta penghormatan atas hak asasi manusia secara universal. Perspektif ini juga meyakini bahwa negara-negara memiliki kepentingan yang sama dalam membatasi penggunaan kekerasan karena dalam kondisi yang anarki, sistem internasional tidak berada dalam kondisi perang yang berlangsung terus menerus. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa negara telah memiliki kemampuan untuk berkompromi pada kekuatan yang lebih besar dan mengakomodasi diri sendiri demi kepentingan yang lebih luas untuk menjaga ketertiban internasional (Burchill, 2005).

Kebutuhan bersama untuk hidup berdampingan dapat meredam konflik jika suatu saat muncul konflik antar negara dalam situasi ini. Keberadaan hukum internasional, organisasi internasional, dialog antar pemerintah serta penghormatan atas kedaulatan nasional menjadi bagian dari kerangka kerja norma, aturan, serta institusi yang membentuk budaya diplomatik internasional (Burchill, 2005).

Wight dalam Burchill menjelaskan kepentingan nasional adalah kepentingan pribadi yang tercerahkan adalah kepentingan yang memperhitungkan semua rintangan dan kemungkinan di jalan menuju pemenuhan, sebuah keegoisan yang, secara negatif, berusaha untuk tidak melanggar atau menghina kepentingan pribadi orang lain, keegoisan yang memberikan pertimbangan positif terhadap

kepentingan orang atau negara lain, dan setuju untuk memodifikasi dan membatasi dirinya sendiri untuk menghormati kepentingan-kepentingan lain ini, karena mengakui hak mereka untuk hidup (Burchill, 2005).

Burchill menyatakan bahwa perspektif ini meyakini bahwa negara-negara harus memahami kepentingan mereka dengan cara yang lebih luas dengan memperhitungkan kewajiban mereka terhadap masyarakat internasional. Linklater berargumen bahwa English School meyakini bahwa hak asasi manusia, keadilan, serta hukum internasional memegang peranan penting dalam tatanan internasional. Selain itu, Bull menyatakan bahwa kepentingan nasional terdiri dari rencana tindakan yang rasional untuk mencapai tujuan yang telah disepakati dan dapat dikontraskan dengan kebijakan-kebijakan yang didasarkan kepada kepentingan-kepentingan kelompok, aliansi, maupun organisasi internasional (Burchill, 2005).

Sehingga dalam kesimpulannya, Burchill menyatakan English School bahwa kepentingan nasional menurut English School terdiri dari aspek keamanan, ekonomi, juga perlu untuk memperhatikan moralitas internasional dan hukum internasional yang menjadi aspek ketiga dalam kepentingan nasional (Burchill, 2005).

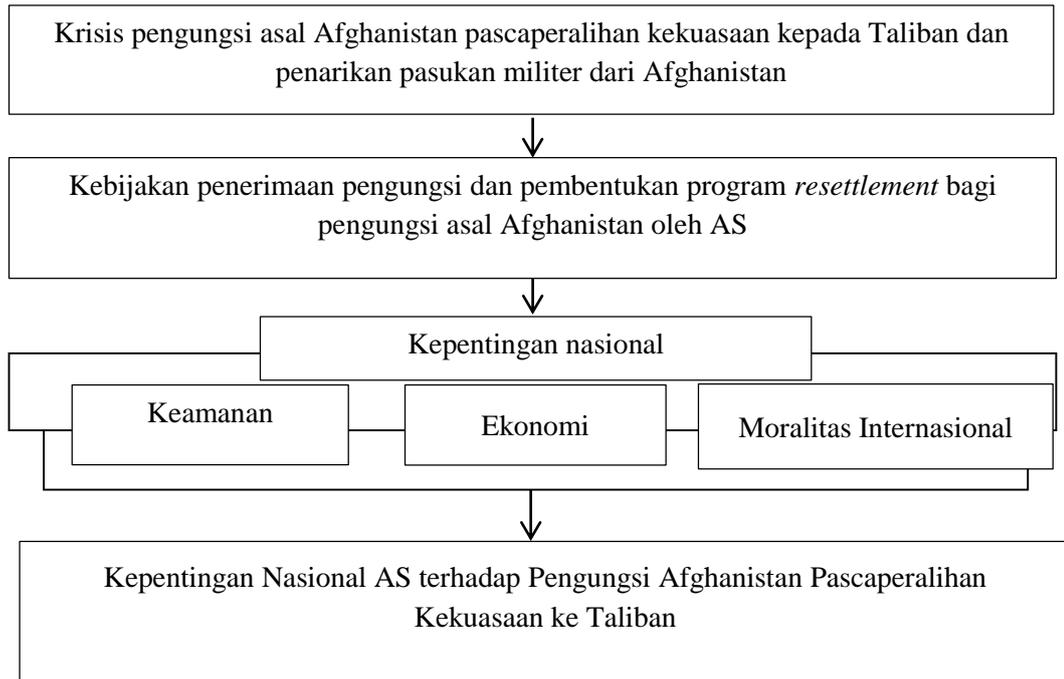
1. Aspek keamanan dan pertahanan, yakni kepentingan yang ditujukan untuk melindungi negara-bangsa, baik eksistensinya maupun sistem pemerintahannya, serta warga negaranya dari ancaman fisik dari negara lain, baik dalam rupa intervensi, invasi, maupun propaganda.
2. Aspek ekonomi, yakni kepentingan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sebuah negara-bangsa.
3. Aspek moralitas internasional, yakni kepentingan yang ditujukan untuk menjaga ketertiban tatanan internasional melalui kewajiban terhadap kemanusiaan.

2.3 Kerangka Pemikiran

Korban pengungsi timbul akibat peralihan kekuasaan terhadap Taliban yang menyebabkan pergerakan pengungsi yang masif ke banyak negara, salah satu negara tujuan pengungsi tersebut adalah AS yang berhubungan dengan konflik tersebut dan berperan sebagai lawan dari kubu Taliban. Pergerakan pengungsi Afghanistan menuju AS menjadi salah satu faktor pembuatan kebijakan luar negeri AS yaitu penetapan program penerimaan pengungsi dan program penempatan kembali pengungsi di wilayah-wilayah yang telah ditetapkan oleh AS. Houghton telah mengemukakan pembentukan kebijakan luar negeri harus memuat kepentingan nasional, sehingga pembentukan kebijakan ini diasumsikan memiliki muatan kepentingan nasional yang hendak dicapai (Houghton, 2007).

McKinsey menggunakan beberapa indikator untuk menilai ekonomi suatu negara, indikator yang digunakan yaitu tren produk domestik bruto (PDB) atau *Gross Domestic Product* (GDP), indikator pertumbuhan lapangan kerja, *unemployment rate* atau tingkat pengangguran, *producer price indexes* atau indeks harga produsen, harga komoditas, inflasi harga makanan, layanan ekonomi hingga kebijakan bank sentral (McKinsey, 2022). Indikator yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah indikator tren GDP serta indikator tren tingkat pengangguran. Penelitian ini akan menyajikan serta mendeskripsikan kedua indikator tersebut dalam rentang waktu 10 tahun terhitung sejak tahun 2012 hingga tahun 2022.

Sedangkan dalam aspek moralitas internasional yang dijelaskan sebelumnya, penulis menggambarkan pencapaian AS dalam komitmen terhadap kemanusiaan dalam konteks pengungsi melalui mendeskripsikan data jumlah pengungsi yang diterima AS dalam rentang waktu 10 tahun yaitu dimulai pada tahun 2012-2022. Dengan menggunakan konsep kepentingan nasional, penulis menganalisa kepentingan nasional AS dalam kebijakan terhadap pengungsi asal Afghanistan tersebut.



Gambar 2 Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini. Metode penelitian adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode ini dimungkinkan untuk melibatkan instrumen yang bisa dalam bentuk kuesioner yang akan diisi responden atau dalam bentuk wawancara, atau juga dalam bentuk observasi dimana penulis dapat memperhatikan dan mengamati respondennya (Bryman, 2012). Hal ini akan bermanfaat pada perencanaan dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang akan membantu penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai hasil penelitian. Metode penelitian mencakup tipe penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, level analisis dan unit analisis hingga teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

3.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang secara umum menekankan penggunaan data berupa kata-kata dan non angka sehingga menekankan pendekatan induktif dalam penggunaan teori dalam penelitian, yang kemudian cenderung menggeneralisir penggunaan teori dalam penelitian. Metode induktif akan berangkat dari sekumpulan bukti dan data menuju ke sebuah kesimpulan. Penelitian kualitatif pada umumnya bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata ataupun gambaran dibandingkan data numerik. Bentuk data bisa dalam bentuk transkrip, foto, video, hingga rekaman resmi lainnya (Neuman, 2014).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan sebuah fenomena yang berangkat dari informasi dasar menuju pemaparan yang lebih mendalam mengenai situasi, aturan sosial, maupun hubungan. Penelitian juga

deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sebuah hal dengan deretan data, penjelasan profil atau mengklasifikasikan data yang dilakukan dengan detail yang rinci dan akurat. Penelitian deskriptif juga memiliki tujuan lain yaitu mendokumentasikan latar belakang serta konteks dari situasi yang akan digambarkan (Bryman, 2012; Mas' oed, 1990; Neuman, 2014).

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan serta menjabarkan kepentingan nasional AS melalui kebijakan luar negeri yang dibentuk sebagai respons dalam menanggapi krisis pengungsi Afghanistan pascaperalihan kekuasaan kepada Taliban dan penarikan pasukan militer pada tahun 2021 melalui rangkaian kebijakan dan bantuan terhadap pengungsi. Sehingga penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan kepentingan keamanan, keuntungan ekonomi hingga pemenuhan nilai-nilai moral AS yang terkait dengan keberadaan moralitas internasional.

Hasil penelitian ini diperoleh dengan melakukan pengumpulan data melalui metode studi pustaka, juga melibatkan analisis dokumen, seperti ulasan literatur, kebijakan, dan catatan-catatan terkait. Dokumen-dokumen ini memberikan konteks dan kerangka kerja konseptual yang mendukung temuan penelitian. Serta melakukan proses triangulasi data dengan menyaring dan mengumpulkan data dari beragam data dan sumber dalam rentang waktu yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada

1. Kondisi pengungsi asal Afghanistan sebelum dan sesudah peralihan kekuasaan kepada Taliban tahun 2021.
2. Kepentingan nasional AS melalui kebijakan luar negeri AS terhadap pengungsi Afghanistan pascaperalihan kekuasaan kepada Taliban dan penarikan pasukan militer dari Afghanistan di tahun 2021 dalam 3 aspek yaitu aspek keamanan, aspek ekonomi, serta aspek moralitas internasional melalui kebijakan yang dibuat AS.

Penulis menjabarkan kepentingan nasional AS melalui rangkaian kebijakan terhadap pengungsi asal Afghanistan tersebut. Dengan menggunakan konsep kepentingan nasional yang telah penulis jabarkan sebelumnya. Konsep kepentingan nasional yang telah dijabarkan di atas, digunakan penulis untuk mengeksplorasi bagaimana penerimaan pengungsi dapat memberikan kontribusi terhadap tiga aspek diatas.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah AS, yaitu dokumen yang berasal dari Kementerian Luar Negeri AS, *United States Refugees Admission Program (USRAP)*, *United States Agency International Development (USAID)*, UNHCR, *World Bank*, juga berita-berita internasional yang dikeluarkan oleh portal berita terpercaya seperti Reuters, New York Times, International Refugee Committee, Al Jazeera, BBC dan VOA. Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang merujuk pada data yang memuat pernyataan maupun dokumen kebijakan pemerintah AS atas krisis pengungsi Afghanistan pada tahun 2021.

Data sekunder ialah data yang telah dikumpulkan oleh penulis yang sudah ada sebelumnya, sehingga penulis melakukan analisis data dengan data yang sudah ada tanpa melakukan penghimpunan data primer. Penggunaan data sekunder ini diperbolehkan mengingat dalam sebagian besar penelitian, adanya perhitungan mengenai durasi dan biaya penelitian. Karena untuk mengumpulkan data primer, akan membutuhkan waktu yang cukup panjang serta biaya yang tidak sedikit. Sehingga dimungkinkan untuk melakukan penelitian sekunder menggunakan data-data sekunder yang sudah ada sebelumnya (Bryman, 2012).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ialah teknik studi pustaka dan studi dokumentasi. Studi pustaka dilakukan pada sumber utama data seperti berita internasional, maupun jurnal artikel dan buku yang kredibel. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan pada sumber data seperti dokumen resmi, dan materi audiovisual dari sosial media resmi milik pemerintah AS. Data-data ini diperoleh dari situs-situs resmi dan terpercaya seperti situs pemerintah, situs berita, dan akun sosial media resmi milik pemerintah AS (Creswell, 2013)

3.5 Level Analisis dan Unit Analisis

Penelitian ini terdiri dari variabel unit analisis dan unit eksplanasi. Penelitian ini memiliki tingkatan analisis yaitu tingkat negara-bangsa yang dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1. Level analisis, unit analisis, dan unit eksplanasi

Tipe Level Analisis: Negara-Bangsa (AS)	
Unit Analisis	Unit Eksplanasi
Kepentingan nasional AS terhadap pengungsi Afghanistan pascaperalihan kekuasaan kepada Taliban dan penarikan pasukan militer.	Kebijakan <i>resettlement</i> AS terhadap pengungsi asal Afghanistan pascaperalihan kekuasaan kepada Taliban dan penarikan pasukan militer.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan serangkaian proses pengumpulan data, pemrosesan data hingga penarikan kesimpulan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif. Creswell mendefinisikan metode penelitian deskriptif sebagai metode yang menggambarkan dan memaparkan situasi secara lebih spesifik dan mendalam. Neumann mendefinisikan pendekatan induktif sebagai

pendekatan dengan mengumpulkan data-data khusus yang menghasilkan jawaban yang bersifat general. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang bersumber pada dokumen resmi pemerintah AS, pemberitaan internasional yang dirilis oleh media yang kredibel seperti Reuters dan New York Times, juga mengumpulkan data yang berasal dari media audiovisual seperti video pernyataan resmi pemerintah AS (Creswell, 2013; Neuman, 2014).

Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahap dalam melakukan analisis data yang terdiri dari kondensasi data dimana penulis melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian data secara deskriptif yang memungkinkan data untuk ditampilkan dalam bentuk tabel, bagan, maupun narasi, hingga penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan cara mengaitkan data tersebut dengan penggunaan konsep yang penulis gunakan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan (Miles & Huberman, 2014).

Adapun tahapan yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kondensasi data

Pada tahap ini, penulis mengumpulkan data yang berasal dari artikel, berita, jurnal, laporan resmi, dan media terkait lalu disederhanakan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b. Penyajian data

Pada tahap ini, data yang telah diproses oleh penulis disajikan dengan deskripsi yang dapat membantu proses penarikan kesimpulan. Data yang disajikan adalah data yang terkait dengan kepentingan nasional AS terhadap pengungsi asal Afghanistan dalam program *resettlement*.

c. Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini, kesimpulan ditarik dari data yang telah dikumpulkan dan dideskripsikan sebagai hasil penelitian.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, AS sebagai negara yang terlibat dalam Perang 20 Tahun di Afghanistan telah membuat kebijakan *resettlement* atau pemukiman kembali bagi para pengungsi Afghanistan yang melarikan diri dari negara asalnya sejak pemindahan kekuasaan dari pemerintahan Afghanistan kepada Taliban pada tahun 2021. Untuk itu, AS telah membentuk program penerimaan dan pemukiman kembali pengungsi yang bekerja sama dengan ragam departemen nasional AS seperti *Department of Homeland Security* (DHS), *Department of State*, dan departemen lainnya hingga organisasi internasional seperti IRC, UNHCR, dan ragam lembaga non profit lokal lainnya.

Program ini secara umum memiliki anggaran per tahun fiskal 2022 sebesar USD 2 miliar dari total anggaran belanja tahunan AS sebesar USD 4 triliun dan kembali menambahkan anggaran sebesar USD5,9 miliar pada tahun berikutnya. Anggaran ini membebankan biaya yang cukup besar bagi pemerintahan AS secara keseluruhan. Namun dari ketiga aspek yang telah penulis paparkan sebelumnya, selain mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan dan bentuk tanggung jawab AS terhadap pengungsi asal Afghanistan, adanya potensi ekonomi AS melalui melalui pajak hingga pendapatan per kapita nasional dapat mengembalikan modal AS pada program penerimaan pengungsi ini bahkan dapat turut berkontribusi pada pemasukan negara yang mana juga dapat berkontribusi pada perekonomian AS secara nasional.

Fungsi pemukiman kembali yang dijelaskan dalam *The Refugee Convention* 1951 juga terpenuhi yang dapat dilihat melalui tiga (3) fungsi yang dijabarkan. Yaitu fungsi proteksi internasional dan pemenuhan kebutuhan dasar hingga kebutuhan spesifik; lalu fungsi solusi jangka panjang dengan jumlah pengungsi yang lebih besar; hingga fungsi pengekspresian solidaritas internasional dan mekanisme pembagian tanggung jawab atas perlindungan pengungsi serta pencegahan dampak buruk dari timbulnya pengungsi yang secara proporsi terlalu banyak di negara lain.

Selain dapat mencapai kepentingan nasional dalam 3 aspek yang dikemukakan oleh Burchill, yaitu aspek keamanan, ekonomi, dan moralitas internasional seperti yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya. Program penerimaan dan pemukiman kembali bagi pengungsi juga memenuhi fungsi sebenarnya dari proses dan kebijakan pemukiman kembali untuk pengungsi asal Afghanistan oleh pemerintah AS. Dengan menerima pengungsi asal Afghanistan, Amerika Serikat tidak sekadar melihatnya sebagai respons terhadap keamanan, ekonomi, dan tanggung jawab moral, melainkan sebagai langkah strategis yang mencirikan kebijakan luar negerinya. Tindakan ini menunjukkan kesiapan AS untuk tidak hanya melibatkan diri dalam penyelesaian masalah negara-negara konflik, tetapi juga menegaskan peranannya pada kerjasama dan nilai-nilai kemanusiaan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian hingga pemaparan temuan sebelumnya, penulis memberikan rekomendasi sebagai tindak lanjut penelitian yang mungkin dapat dijadikan pertimbangan, saran, dan masukan bagi penulis berikutnya yang tertarik dan ingin meneliti topik yang sama. Harapannya, penelitian ini dapat menjadi rujukan penelitian terdahulu terkait hasil analisis kepentingan nasional suatu negara terhadap penerimaan pengungsi yang berasal dari negara lain secara spesifik. Hal ini menarik untuk diteliti

sebab negara penerima tentu memiliki dinamika hubungan bilateral yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya sehingga idealnya akan ada hasil yang berbeda dari setiap negara yang diteliti.

Sehingga bagi penulis yang ingin meneruskan penelitian fenomena dari tema ini, diharapkan dapat melakukan penelitian dengan lebih dalam, spesifik serta mencari data yang lebih rinci dan detail dengan rentang waktu yang lebih panjang untuk dapat menjelaskan fenomena ini dengan lebih baik dan lebih dalam. Selain itu, diharapkan penelitian berikutnya akan memuat lebih banyak referensi yang berasal dari berbagai sumber ilmiah yang kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan seperti artikel jurnal, buku, hingga tulisan ilmiah lainnya yang dapat mendukung penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adar, S., Angenendt, S., Asseburg, M., Bossong, R., & Kipp, D. (2020). The Refugee Drama in Syria, Turkey, and Greece. *Stiftung Wissenschaft Und Politik, German Institute for International and Security Affairs*, 16. <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-68248-2>
- Administration for Children & Families. (2023, February 28). *Resettlement Agencies*. <https://www.acf.hhs.gov/orr/grant-funding/resettlement-agencies>
- Ahmadi, D. M. H. (2022). *Higher Education of Afghanistan under the Taliban Rule*.
- Akhtar, F., & Ranjan, A. (2021). *Afghanistan's Education Sector: Prospects Under Taliban Rule / IPCS*. http://www.ipcs.org/comm_select.php?articleNo=5791
- Al Jazeera. (2021, November 10). *Aid group says 4000-5000 Afghans crossing into Iran daily*. <https://www.aljazeera.com/news/2021/11/10/aid-groups-says-2000-5000-afghans-crossing-into-iran-daily>
- Attitudes on taking in refugees vary by party, race and ethnicity. (2023). *Pew Research Center*. <https://www.pewresearch.org/short-reads/2022/09/19/most-americans-express-support-for-taking-in-refugees-but-opinions-vary-by-party-and-other-factors/>
- Authenticated U.S. Government Information. (2021). *Extending Government Funding and Delivering Emergency Assistance Act*. <https://congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/5305>
- Ball, R. (2021). *Handbook Bibliometrics*. De Gruyter Saur. <https://doi.org/10.1515/9783110646610>
- Barlas, A. W., & Ammar, A. (2022). *Do Afghan Youth Think of Migrating to other Countries under the Taliban Regime?* <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/114106/>

- Baugh, R. (2020). *Refugees and Asylees: 2019* (Annual Flow Report, p. 10). Department of Homeland Security. https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/immigration-statistics/yearbook/2019/refugee_and_asylee_2019.pdf
- BBC. (2021, August 29). *Afghanistan: British ambassador home as last UK troops leave—BBC News*. <https://www.bbc.com/news/uk-58372437>
- BBC News. (2017, February 10). *Trump's executive order: Who does travel ban affect?*
- BBC News. (2021, August 15). *Afghanistan conflict: Kabul falls to Taliban as president flees. BBC News*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-58223231>
- Bruton, A. B. (2019). *Bacha Bazi and Human Rights Violations in Afghanistan: Should the U.S. Military Have Done More to Protect Underage Boys?* *108*(1), 179–198.
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods* (4th ed.). Oxford University Press.
- Burchill, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/9780230005778>
- Bureau of Consular Affairs, US. (2022). *Special Immigrant Visas for Afghans—Who Were Employed by/on Behalf of the U.S. Government*. <https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/special-immig-visa-afghans-employed-us-gov.html>
- Bureau of Population, Refugees and Migration (PRM). (2023a). *FY 2023 Reception and Placement Program Affiliate Sites* (p. 1). <https://www.wrapsnet.org/documents/PRM-FY23-Affiliate-Sites.pdf>
- Bureau of Population, Refugees and Migration (PRM). (2023b). *PRM Refugee Admissions Report as of 28 Feb 2023*. [https://www.wrapsnet.org/documents/PRM Refugee Admissions Report as of 28 Feb 2023.xlsx](https://www.wrapsnet.org/documents/PRM%20Refugee%20Admissions%20Report%20as%20of%2028%20Feb%202023.xlsx)
- Bureau of Population, Refugees and Migration (PRM). (2023c). *At-Risk Populations—United States Department of State*. <https://www.state.gov/other-policy-issues/at-risk-populations>
- Carrano, V. (2019). Promoting Compliance with Human Rights: The Performance of the United Nations' Universal Periodic Review and Treaty Bodies. *International Studies Quarterly*, *63*, 1079–1093. <https://doi.org/10.1093/isq/sqz078>

- Congressional Budget Office. (2023). Revenue in Fiscal Year 2022: An Infographic. *Revenue in Fiscal Year 2022: An Infographic*. <https://www.cbo.gov/publication/58891>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (3rd ed). SAGE Publications.
- Crossey, M. (2005, June 1). *Improving linguistic interoperability*. NATO Review. <https://www.nato.int/docu/review/articles/2005/06/01/improving-linguistic-interoperability/index.html>
- Dijk, A. V., & Soeters, J. L. (2008). Language matters in the military. *Contributions to Conflict Management, Peace Economics and Development*, 7, 303–325. [https://doi.org/10.1016/S1572-8323\(08\)07016-1](https://doi.org/10.1016/S1572-8323(08)07016-1)
- Here's where Afghan evacuees have resettled in the U.S. (2022, February 24). *CBS News*. <https://www.cbsnews.com/news/afghan-evacuees-resettled-us-texas-california-virginia/>
- Houghton, D. P. (2007). Reinvigorating the Study of Foreign Policy Decision Making: Toward a Constructivist Approach. *Foreign Policy Analysis*, 3(1), 24–45. <https://doi.org/10.1111/j.1743-8594.2007.00040.x>
- Human Rights First. (2023). *National Security Voices on Refugee Resettlement*. <https://humanrightsfirst.org/wp-content/uploads/2017/01/fact-sheet-national-security-validators-refugees.pdf>
- ILO estimates underscore Afghanistan employment crisis*. (2022, January 19). [Press release]. http://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_834527/lang--en/index.htm
- Information for Afghan Nationals | USCIS*. (2023, March 9). <https://www.uscis.gov/humanitarian/information-for-afghan-nationals>
- International Rescue Committee (IRC). (2021, September 28). *How many refugees will President Biden welcome from Afghanistan and other countries?* International Rescue Committee (IRC). <https://www.rescue.org/article/how-many-refugees-will-president-biden-welcome-afghanistan-and-other-countries>
- International Rescue Committee (IRC). (2022, August 11). *Economic Experience of Afghans Who Arrived Through Operation Allies Welcome*. <https://www.rescue.org/report/economic-experience-afghans-who-arrived-through-operation-allies-welcome>

- Jackson, R., & Sørensen, G. (2013). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* (5th ed.). Oxford University Press.
- Jones, S. V. (2015). *Ending Bacha Bazi: Boy Sex Slavery and the Responsibility to Protect Doctrine*. 25(1), 63–78. <https://dx.doi.org/10.18060/7909.0005>
- Kerwin, D. (2016). How Robust Refugee Protection Policies Can Strengthen Human and National Security. *Journal on Migration and Human Security*, 58.
- Kerwin, D. (2018). The US Refugee Resettlement Program — A Return to First Principles: How Refugees Help to Define, Strengthen, and Revitalize the United States. *Journal on Migration and Human Security*, 6(3), 205–225. <https://doi.org/10.1177/2331502418787787>
- Kshatriya. (2019). Introduction to International Refugee Law. First Lecture: INTL 190—SP19. *La Jolla, UC San Diego*.
- LIRS. (2021). *U.S. Employers' Guide to Hiring Afghan Refugees*. https://www.lirs.org/wp-content/uploads/2021/11/Tent_US-Guide-to-Hiring-Afghan-Refugees-AW_Web.pdf
- Lutz, P., & Portmann, L. (2021). *Why do states admit refugees? A comparative analysis of resettlement policies in OECD countries*. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2021.1999222>
- Marouf, H. (2022, February 22). فرار مغزها پس از تسلط طالبان؛ تنها از سه دانشگاه ۲۲۹ فارسی *BBC News* استناد کشور را ترک کرده‌اند. <https://www.bbc.com/persian/afghanistan-60200786>
- Mas'oed, M. (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Masterson, D., & Yassenov, V. (2021). Does Halting Refugee Resettlement Reduce Crime? Evidence from the US Refugee Ban. *Cambridge University Press*, 115(3), 1066–1073. <https://doi.org/10.1017/S0003055421000150>
- McKinsey. (2022, August). What is economic growth? *McKinsey & Company*, 6.
- Menon, S. (2022, August 16). *Afghanistan: What's changed a year after Taliban return*. <https://www.bbc.com/news/62469204>
- Micinski, N. R. (2018). Refugee Policy as Foreign Policy: Iraqi and Afghan Refugee Resettlements to the United States. *Refugee Survey Quarterly*, 37(3), 253–278. <https://doi.org/10.1093/rsq/hdy007>

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Mitra, R., T. A., M., & Sen, K. (2022). Does Refugee Inflow Increase Crime Rates in the United States? *Soc Indic Res*, *164*, 1379–1401. <https://doi.org/10.1007/s11205-022-02996-5>
- Nadeem, R. (2021, September 23). 3. Biden administration's handling of Afghanistan and views of accepting Afghan refugees in the U.S. *Pew Research Center - U.S. Politics & Policy*. <https://www.pewresearch.org/politics/2021/09/23/biden-administrations-handling-of-afghanistan-and-views-of-accepting-afghan-refugees-in-the-u-s/>
- Neuman, W. L. (2014). *Basics of Social Research: Qualitative & Quantitative Approaches* (3rd ed.). Pearson.
- New American Economy. (2021, August 25). *Afghan Immigrants in the United States*. <https://newamericaneconomy.org/afghan-immigrants-in-the-united-states>
- NRC. (2021, August). *Humanitarian needs in Iran rise as 300,000 Afghans arrive since Taliban takeover*. <https://nrc.no/news/2021/november/humanitarian-needs-in-iran-rise-as-300000-afghans-arrive-since-taliban-takeover>
- OECD. (2016). *Refugees are not a burden but an opportunity*. <https://www.oecd.org/migration/refugees-are-not-a-burden-but-an-opportunity.htm>
- Pearlman, W. (2017). *Culture or Bureaucracy? Challenges in Syrian Refugees' Initial Settlement in Germany*. *9*, 313–327. <https://doi.org/10.1163/18763375-00903002>
- President Trump Gives a Presidential Address to the Nation—YouTube*. (2021). https://www.youtube.com/watch?v=_EiUjcu_Dw0&feature=youtu.be
- Qazi, A. (2018). A Look at the Languages Spoken in Afghanistan. *Afghanistan Online - Languages*. afghan-web.com/languages
- Radio Free Europe/Radio Liberty. (2021, September 13). *Tajikistan Accepts Around 100 Afghans Fleeing The Taliban, But Sends 100 Back*. <https://www.rferl.org/a/afghanistan-refugees-tajikistan-taliban/31457626.html>
- Rasanayagam, A. (2003). *Afghanistan: A Modern History*. I.B. Tauris.

- Refugee Processing Center. (2023). *Archives—Refugee Processing Center*.
wrapsnet.org/archives
- RentCafe. (2023). *Average Rent in the U.S., updated July 2023* [dataset].
rentcafe.com/average-rent-market-trends/us/
- Reuters. (2021a, August 21). *Uzbekistan accepts 400 more refugees from Afghanistan—Russian state media*.
<https://www.reuters.com/world/uzbekistan-accepts-400-more-refugees-from-afghanistan-russian-state-media-2021-08-21>
- Reuters. (2021b, August 26). *Explainer: Who are the Afghan refugees coming to the U.S. and what happens when they arrive?* | Reuters.
<https://www.reuters.com/world/who-are-afghan-refugees-coming-us-what-happens-when-they-arrive-2021-08-26/>
- Reuters. (2021c, August 30). Factbox: Evacuations from Afghanistan by country. *Reuters*.
<https://www.reuters.com/world/evacuations-afghanistan-by-country-2021-08-26/>
- Runion, M. L. (2007). *The history of Afghanistan*. Greenwood Press.
- Schmeidl, S., & Bose, S. (2016). Youth Interrupted: The Consequences of Urban Displacement for Young Men and Women in Afghanistan. *Journal of Peacebuilding & Development*, 11(3), 68–82.
<https://doi.org/10.1080/15423166.2016.1230023>
- state.gov. (2021). Refugee Admissions. *United States Department of State*.
<https://www.state.gov/refugee-admissions/>
- Temporary Protected Status* | USCIS. (2023, March 2).
<https://www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status>
- The UN Refugee Agency. (2011). *UNHCR Resettlement Handbook*. The UN Refugee Agency.
- The White House. (2021a, April 14). *Remarks by President Biden on the Way Forward in Afghanistan*. The White House.
<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2021/04/14/remarks-by-president-biden-on-the-way-forward-in-afghanistan/>
- The White House. (2021b, July 8). *Remarks by President Biden on the Drawdown of U.S. Forces in Afghanistan*. The White House.
<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches->

remarks/2021/07/08/remarks-by-president-biden-on-the-drawdown-of-u-s-forces-in-afghanistan/

The White House 45 Archived. (2020). We have the greatest troops in the world—And our troops in Afghanistan are coming home by the end of the year. <https://t.co/dC69OGkocS> [Tweet]. @WhiteHouse45. <https://twitter.com/WhiteHouse45/status/1314196588823281664>

Thomas, C., Hoehn, J. R., McGarry, B. W., Campbell, C., McInnis, K. J., & Katzman, K. (2021). *U.S. Military Withdrawal and Taliban Takeover in Afghanistan: Frequently Asked Questions*. Congressional Research Service. <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46879>

Trustees of Indiana University. (2021). *Dari Phrasebook for Refugee Assistance*. https://celcar.indiana.edu/materials/images/PDF_Dari_Pashto_PhraseBook_Military_2021_5x7_v3.pdf

UNAMA. (2022, July 20). *UN RELEASES REPORT ON HUMAN RIGHTS IN AFGHANISTAN SINCE THE TALIBAN TAKEOVER*. <https://unama.unmissions.org/un-releases-report-human-rights-afghanistan-taliban-takeover>

UNHCR. (1990). *The Refugee Convention, 1951: The Travaux préparatoires analysed with a Commentary by Dr. Paul Weis*. <https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html>

UNHCR. (2023). *Mid-Year Trends 2023* (p. 32). <https://www.unhcr.org/mid-year-trends-report-2023>

UNHCR. (2021a). *Resettlement*. UNHCR. <https://www.unhcr.org/resettlement.html>

UNHCR. (2021b). *The 1951 Refugee Convention*. UNHCR. <https://www.unhcr.org/1951-refugee-convention.html>

UNHCR. (2021c). *UNHCR - Refugee Statistics*. UNHCR. <https://www.unhcr.org/refugee-statistics/>

UNHCR. (2022). *What is a refugee?* UNHCR. <https://www.unhcr.org/what-is-a-refugee.html>

United States Department of State. (2022). *Reception and Placement* [Government website]. <https://www.state.gov/refugee-admissions/reception-and-placement>

- US Congress. (1952). *Immigration and Nationality Act*. <https://govinfo.gov/content/pkg/COMPS-1376/pdf/COMPS-1376.pdf>
- U.S. Department of State. (2023). *Family Reunification for Afghans*. <https://www.state.gov/afghanistan-family-reunification/>
- US Department of State, & Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. (2022). *Afghanistan 2022 Human Rights Report* (Human Rights Report).
- USAFacts. (2021, September). *Where do refugees resettle in the US?* <https://usafacts.org/articles/where-do-refugees-resettle-in-the-us/>
- USCIS. (2018). *Chapter 3—Immigrant Membership in Totalitarian Party*. <https://uscis.gov/policy-manual/volume-8-part-f-chapter-3>
- Vieux, H., & Donovan, D. F. (2018). *Brief of Amici Curiae Retired Generals and Admirals of The U.S. Armed Forces in Support of Respondents*. Supreme Court of the United States. https://supremecourt.gov/DocketPDF/17/17-965/41713/20180330120220844_17-965%20Retired%20Generals%20and%20Admirals%20of%20The%20US%20Armed%20Forces%20Amicus%20Brief.pdf
- VOA. (2021, December 16). *More Than 300,000 Afghans Flee to Pakistan Since Taliban Takeover of Afghanistan*. <https://voanews.com/a/more-than-300-000-afghans-flee-to-pakistan-since-taliban-takeover-of-afghanistan6357777.html>
- Washington Post. (2015, March 24). Obama agrees to slow U.S. troop withdrawal from Afghanistan. *Washington Post*. https://www.washingtonpost.com/politics/obama-agrees-to-slow-us-troop-withdrawal-from-afghanistan/2015/03/24/6acd4834-d247-11e4-a62f-ee745911a4ff_story.html
- Washington Post. (2021, September). *The Afghan evacuation and the war—By the numbers*. *The Washington Post*. <https://www.washingtonpost.com/politics/2021/09/02/afghan-evacuation-war-by-numbers-/>
- White House. (2021). *Statement by President Biden on the International Day for the Elimination of Racial Discrimination*. <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/21/statement-by-president-biden-on-the-international-day-for-the-elimination-of-racial-discrimination>

- World Bank. (2023a). *Labor force, total—United States* [dataset].
data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN?locations=US&start=2012
- World Bank. (2023b). *Unemployment, total (% of total labor force) (national estimate)—United States* [dataset].
data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.NE.ZS?locations=US&start=2012
- World Bank. (2022, June). Labor force participation rate, female (% of female population ages 15+) (modeled ILO estimate)—Afghanistan. *Data World Bank*.
<https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=AF>
- Zakuan, U. A. A. (2005). The Background and Causes of Refugee Problems in Afghanistan. *Universiti Utara Malaysia, Journal of International Studies*, 37–51.